

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
*INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR)***

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

M. DONI SETIAWAN

31402000095

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *INTERNET*
*FINANCIAL REPORTING (IFR)***

Disusun Oleh:

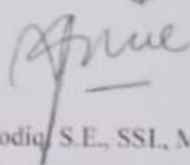
M. Doni Setiawan

31402000095

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 2026

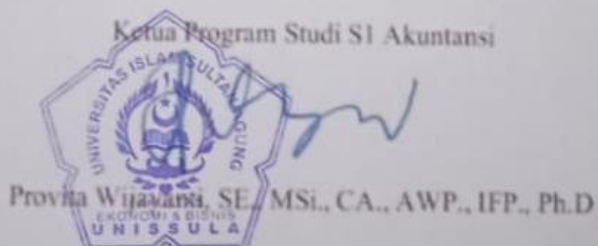
Dosen Pembimbing



Dr. H. Muhammad Ja'far Shodiq, S.E., SSL, M.Si., CA, CSRS, CSRA, ACPA

NIK. 211498009

Ketua Program Studi SI Akuntansi



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
Provita Wijawanti, SE, MSi., CA., AWP., IFP., Ph.D

NIK 06110990001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Doni Setiawan
NIM : 31402000095
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (IFR)” adalah benar hasil karya saya sendiri (bersifat original) dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini atau terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2026

Yang menyatakan,



M. Doni Setiawan

NIM. 31402000095

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalaamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (IFR)” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto S.H., M.H selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA, IFP, AWP selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. M. Ja'far Shodiq, S.E., SSI., M.Si., CA, CSRS, IFP, AWP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2020, atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah terjalin selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan wawasan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 2026



Penulis,

M. Doni Setiawan

NIM. 31402000095



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *internet financial reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan variabel pendapatan asli daerah (PAD), kekayaan daerah, dan opini audit periode 2022–2024. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 daerah selama tiga tahun pengamatan sehingga diperoleh 105 data observasi. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet financial reporting*, kekayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *internet financial reporting*, sedangkan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*.

Kata Kunci: *Internet Financial Reporting*, Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, Opini Audit.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing internet financial reporting (IFR) in local governments of Central Java Province by using regional original revenue (PAD), regional wealth, and audit opinion as independent variables for the period 2022–2024. The population and sample consist of all 35 regency and municipal governments in Central Java observed over three years, resulting in 105 data observations. This research employs a quantitative approach with descriptive and verificative methods. The data analysis techniques include descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, F-test, and t-test. The results indicate that partially regional original revenue has a positive and significant effect on internet financial reporting, regional wealth has a negative and significant effect on internet financial reporting, while audit opinion does not have a significant effect on internet financial reporting.

Keywords: Internet Financial Reporting, Regional Original Revenue, Regional Wealth, Audit Opinion.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), kekayaan daerah, dan opini audit terhadap *internet financial reporting* (IFR) pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta observasi langsung terhadap website resmi pemerintah daerah. Sampel penelitian adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 daerah dengan total 105 observasi selama tiga tahun. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat *internet financial reporting*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet financial reporting*, yang berarti semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli maka semakin tinggi tingkat keterbukaan laporan keuangan melalui media internet. Kekayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *internet financial reporting*, yang menunjukkan bahwa besarnya total aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak selalu mendorong peningkatan transparansi keuangan berbasis digital. Sementara itu, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah melalui pendapatan asli daerah lebih berperan dalam mendorong transparansi keuangan

digital dibandingkan dengan besaran aset maupun opini audit yang diterima pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat akuntabilitas publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti kualitas sumber daya manusia, tingkat pemanfaatan teknologi informasi, atau faktor tata kelola pemerintahan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai determinan *internet financial reporting*.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.5.1 Manfaat Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Praktis	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>).....	10
2.2 <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).....	11
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13
2.4 Kekayaan Daerah	14
2.5 Opini Audit	15
2.6 Penelitian Terdahulu	16
2.7 Hipotesis Penelitian.....	39
2.8 Kerangka Berpikir.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	45
3.2.1 Populasi.....	45
3.2.2 Sampel.....	46
3.3 Jenis dan Sumber Data	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	47
3.6 Metode Analisis Data.....	50
3.6.1 Analisis Deskriptif	51

3.6.2 Uji Asumsi Klasik	51
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	54
3.6.4 Uji Parsial (t-Test).....	54
3.6.5 Uji Simultan (F-Test)	55
3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.2 Statistik Deskriptif	58
4.3 Uji Asumsi Klasik	61
4.3.1 Uji Normalitas	62
4.3.2 Uji Multikolinearitas	65
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	66
4.3.4 Uji Autokorelasi	68
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	69
4.5 Uji Parsial (t-Test).....	73
4.6 Uji Simultan (F-Test)	75
4.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	77
4.8 Pembahasan.....	79
4.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	79

4.8.2 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	81
4.8.3 Pengaruh Opini Audit terhadap <i>Internet Financial Reporting</i>	83
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	88
5.3 Saran.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3 1 Definisi Operasional Variabel	47
Tabel 4 1 Analisis Statistik Deskriptif	58
Tabel 4 2 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)	62
Tabel 4 3 Hasil Uji Miltikolinearitas	65
Tabel 4 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
Tabel 4 5 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel 4 6 Model Summary	69
Tabel 4 7 Coefficients	71
Tabel 4 8 Hasil Uji Parsial (t-Test)	73
Tabel 4 9 Hasil Uji Simultan (F-Test)	76
Tabel 4 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	77

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4 1 Normal Q_Q Plot.....	63
Grafik 4 2 Detrended Normal Q_Q Plot	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	44
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah	95
Lampiran 2 Data Variabel Penelitian Tahun 2022-2024	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara mendasar cara organisasi publik mengelola, menyajikan, dan mengungkapkan informasi keuangan. Pemerintah, sebagai entitas publik yang mengelola dana masyarakat, menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi keuangan. Salah satu bentuk konkret dari tuntutan tersebut adalah penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR), yaitu penyampaian informasi keuangan melalui media internet.

Dalam *THE IMPLEMENTATION OF INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW* mendefinisikan *Internet Financial Reporting* (IFR) sebagai “proses pengungkapan laporan keuangan dan informasi keuangan publik melalui situs web resmi dan platform digital, yang bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah” (Zumratul Meini et al., 2023). Definisi ini menunjukkan bahwa IFR tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai media untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan di era digital.

Peningkatan penerapan IFR pada sektor publik di Indonesia sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penerapan prinsip *open government*. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong setiap pemerintah daerah untuk memiliki situs web resmi yang memuat laporan keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara transparan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dan pelaporan keuangan berbasis hasil.

Meskipun demikian, implementasi IFR di tingkat pemerintah daerah belum berjalan secara merata. Berdasarkan data portal data.jatengprov.go.id dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, tingkat keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2024 menunjukkan tren peningkatan, namun belum merata antar kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta telah mencapai tingkat keterbukaan informasi yang tinggi, sementara sejumlah daerah lain masih menampilkan data keuangan yang terbatas. Kondisi ini mencerminkan adanya faktor internal yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan IFR, baik dari sisi kapasitas fiskal, infrastruktur teknologi, maupun kualitas tata kelola keuangan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat penerapan IFR dipengaruhi oleh karakteristik keuangan dan kelembagaan pemerintah daerah. Salah satu faktor utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dengan PAD tinggi memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar untuk membiayai pengembangan sistem informasi dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan IFR. Hasil penelitian Sri Wahyuni Wulandari dan Erna Sulistyowati (2024) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pelaksanaan IFR, sedangkan penelitian Anastasia Yaniarwana Sarumaha dkk. (2024) menemukan pengaruh negatif, dan penelitian Triana Saraswati dkk (2023) menyatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap IFR masih belum konsisten, sehingga menarik untuk diuji kembali.

Selain itu, kekayaan daerah juga dipandang berperan penting dalam mendorong transparansi laporan keuangan berbasis internet. Pemerintah daerah dengan kekayaan tinggi memiliki potensi fiskal dan infrastruktur yang lebih baik dalam menyediakan sistem pelaporan daring. Roviko Erni Anisaputri (2022) dan Ade Irma Susanti dkk. (2024) membuktikan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap IFR. Namun, Winangsih dan Rigel Nurul Fathah (2023) menemukan pengaruh negatif, sementara Sri Rahayu dan Farida Wahyu Nur Khasanah (2022) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan. Inkonsistensi hasil ini menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah masih perlu dikaji ulang, terutama dalam konteks karakteristik fiskal daerah di Jawa Tengah.

Faktor berikutnya adalah opini audit. Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan serta efektivitas pengendalian internal. Pemerintah daerah dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) umumnya memiliki sistem pelaporan yang lebih tertib dan transparan. Namun, penelitian sebelumnya memberikan hasil yang beragam: Triana Saraswati dkk. (2023) menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap IFR, Fitri Wahyuni dan Arya Arpris Pangestu (2024) menemukan pengaruh negatif (melalui peran moderasi), sedangkan Roviko Erni Anisaputri (2022) serta Anastasia Yaniarwana Sarumaha dkk. (2024) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi antar daerah dan periode waktu yang patut dikaji lebih dalam.

Konteks Jawa Tengah menjadi menarik karena provinsi ini memiliki 35 pemerintah daerah (29 kabupaten dan 6 kota) dengan variasi kapasitas fiskal, tingkat kekayaan, serta perbedaan opini audit yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya. Menurut data BPS Jawa Tengah (2024), disparitas ekonomi antar kabupaten/kota masih cukup tinggi, yang dapat memengaruhi tingkat transparansi keuangan publik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit memengaruhi tingkat *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada pemilihan variabel independen yang lebih fokus, yakni hanya menggunakan tiga faktor keuangan utama (PAD, kekayaan daerah, dan opini audit) yang secara empiris paling sering diuji namun masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data terbaru periode 2022–2024, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran terkini mengenai kondisi transparansi keuangan berbasis digital pada pemerintah daerah di Jawa Tengah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai *Internet Financial Reporting* serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik di era digital.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat penelitian dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (IFR)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) oleh pemerintah daerah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, kenyataannya masih terdapat perbedaan tingkat pelaksanaan IFR antar pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa belum semua daerah mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik.

Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal pemerintah daerah, seperti tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemampuan fiskal daerah, Kekayaan Daerah yang menggambarkan kapasitas sumber daya ekonomi yang dimiliki, serta Opini Audit yang menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi IFR masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian menemukan bahwa PAD dan kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap IFR, sementara penelitian lainnya menunjukkan hasil berbeda. Demikian pula dengan opini audit, yang dalam beberapa studi terbukti berpengaruh terhadap keterbukaan informasi keuangan daerah, namun pada penelitian lain tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan transparansi keuangan pemerintah daerah di era digital.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik keuangan dan kelembagaan terhadap penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap IFR.
2. Menganalisis pengaruh kekayaan daerah terhadap IFR.
3. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap IFR.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini dapat kita pahami. Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini akan dibahas manfaat praktis dan teoritisnya

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai *Internet Financial Reporting* di sektor publik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik transparansi keuangan, *good governance*, dan implementasi *e-government*.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan berbasis digital. Faktor-faktor yang terbukti berpengaruh positif terhadap IFR dapat dijadikan fokus kebijakan dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Semakin tinggi tingkat transparansi melalui IFR, semakin mudah masyarakat dalam mengawasi kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai wujud partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan maupun sebagai acuan riset selanjutnya bila memakai topik yang relevan dengan riset ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi (*Legitimacy Theory*) memandang bahwa keberlangsungan suatu entitas sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap aktivitas dan kebijakan yang dijalankan. Suatu organisasi hanya dapat mempertahankan eksistensinya apabila tindakannya selaras dengan nilai, norma, dan harapan sosial yang berkembang. Menurut Meutia et al. (2022), teori legitimasi menekankan pentingnya hubungan sosial antara organisasi dan masyarakat, di mana organisasi harus beroperasi dalam batas-batas nilai dan norma yang diterima untuk mempertahankan keberadaannya. Dalam konteks pemerintah daerah, legitimasi publik menjadi penting karena kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah berpengaruh terhadap stabilitas dan kredibilitas lembaga pemerintahan.

Ogunode (2022) juga menjelaskan bahwa legitimasi dapat diperoleh melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi keuangan secara terbuka berbasis digital, salah satunya melalui *Internet Financial Reporting* (IFR). Dengan IFR, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi tuntutan akuntabilitas publik, tetapi juga

membangun citra positif sebagai entitas yang terbuka terhadap pengawasan masyarakat.

Dalam perspektif teori legitimasi, *Internet Financial Reporting* (IFR) dipahami sebagai instrumen strategis untuk menjaga pengakuan sosial. Pemerintah daerah dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai sekaligus menghadapi tuntutan transparansi yang lebih besar dari masyarakat. Kondisi serupa berlaku pada daerah dengan tingkat kekayaan yang signifikan, di mana kapasitas fiskal yang tinggi sering kali diikuti oleh ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi yang lebih luas. Selain itu, opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merepresentasikan bentuk legitimasi formal atas pengelolaan keuangan daerah dan dapat mendorong peningkatan praktik pelaporan berbasis internet (*Accounting Analysis Journal*, 2024).

Dengan demikian, teori legitimasi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah daerah cenderung meningkatkan transparansi keuangan digital sebagai strategi memperoleh dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Variabel seperti PAD, tingkat kekayaan daerah, dan opini audit diasumsikan memengaruhi intensitas implementasi IFR sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat.

2.2 Internet Financial Reporting (IFR)

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi dalam menyajikan dan menyebarluaskan informasi keuangan. Salah satu bentuk inovasi

tersebut adalah *Internet Financial Reporting* (IFR). IFR memungkinkan pemerintah atau entitas pelapor untuk menjangkau pemangku kepentingan secara lebih luas dan efisien.

Internet Financial Reporting (IFR) merujuk pada praktik penyampaian laporan keuangan serta informasi pendukung lainnya melalui media internet oleh entitas sektor publik. Pemanfaatan platform digital ini bertujuan untuk memperluas keterbukaan informasi, memperkuat pertanggungjawaban, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah (Zumratul Meini et al., 2023). Suprianto dan Salim (2024) menjelaskan bahwa penggunaan internet sebagai sarana pelaporan memungkinkan informasi keuangan disebarkan secara lebih cepat dan efisien, sehingga dapat diakses publik kapan saja tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Bagi pemerintah daerah, penerapan IFR mencerminkan transformasi menuju sistem pelaporan yang lebih modern dan selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penerapan IFR tidak hanya berkaitan dengan aspek transparansi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Wulandari dan Sulistyowati (2024) menegaskan bahwa tingkat implementasi IFR dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi guna memperluas akses publik terhadap laporan keuangan. Dengan demikian semakin tinggi tingkat IFR, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Kajian mengenai Internet Financial Reporting pada sektor publik menunjukkan peningkatan perhatian terhadap pentingnya transparansi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sejumlah penelitian menyoroti bahwa praktik pelaporan keuangan berbasis internet tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis penyajian informasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi digital, akuntabilitas publik, serta penerapan e-government dalam pengelolaan keuangan daerah ((Octavio & Urumsah, 2024), (Anindita & Setiawan, 2025)(Puji Astuti & Putri Pertiwi, 2022)).

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber ekonomi yang berasal dari wilayahnya sendiri. Komponen tersebut meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya. Kurniawati & Sari (2023), menjelaskan bahwa besaran PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, terutama dalam membiayai aktivitas pemerintahan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD, semakin luas pula ruang fiskal yang dimiliki daerah untuk mengembangkan infrastruktur dan sistem pendukung, termasuk sistem pelaporan keuangan berbasis digital seperti Internet Financial Reporting (IFR).

Secara yuridis, ketentuan mengenai PAD diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam UU No. 33 Tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut, PAD terdiri atas:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, PAD sering digunakan sebagai indikator kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Daerah dengan tingkat PAD yang lebih tinggi umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memperkuat tata kelola keuangan, termasuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi.

2.4 Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah merepresentasikan keseluruhan sumber daya ekonomi yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah, baik berupa aset tetap maupun aset lancar. Besarnya aset yang dimiliki mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam menunjang aktivitas pemerintahan. Susanti, Yulianingsih, dan Nuraini (2024) menyebutkan bahwa tingkat kekayaan daerah dapat digunakan sebagai ukuran kemampuan finansial pemerintah daerah dalam membiayai operasional serta menjalankan program pembangunan. Dalam kaitannya dengan Internet Financial Reporting (IFR), daerah dengan aset yang lebih besar cenderung memiliki

dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih memadai untuk mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi.

Dari sisi regulasi, pengelolaan aset daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kekayaan daerah mencakup berbagai bentuk aset, seperti tanah, bangunan, infrastruktur, peralatan, hingga investasi yang dimiliki pemerintah daerah.

Secara konseptual, pengelolaan aset yang efektif berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung kualitas pelayanan publik dan memperkokoh posisi keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang.

2.5 Opini Audit

Opini audit merupakan bentuk penilaian profesional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat keandalan laporan keuangan, kesesuaiannya dengan standar yang berlaku, serta ada atau tidaknya salah saji material (Triana et al., 2023)

Pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil audit dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Wajar (Adverse)
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer).

Perolehan opini tertentu sering dikaitkan dengan reputasi dan legitimasi pemerintah daerah. Daerah yang memperoleh opini WTP cenderung berupaya mempertahankan citra positif tersebut, salah satunya melalui peningkatan keterbukaan informasi keuangan berbasis internet. Di sisi lain, daerah yang menerima opini selain WTP dapat terdorong untuk memperbaiki persepsi publik dengan memperkuat transparansi melalui praktik Internet Financial Reporting (IFR) (Wahyuni dan Arpris Pangestu, 2024). Dengan demikian, opini audit diasumsikan berkaitan dengan tingkat penerapan IFR, meskipun arah hubungan tersebut dapat berbeda sesuai dengan kondisi dan motivasi masing-masing daerah.

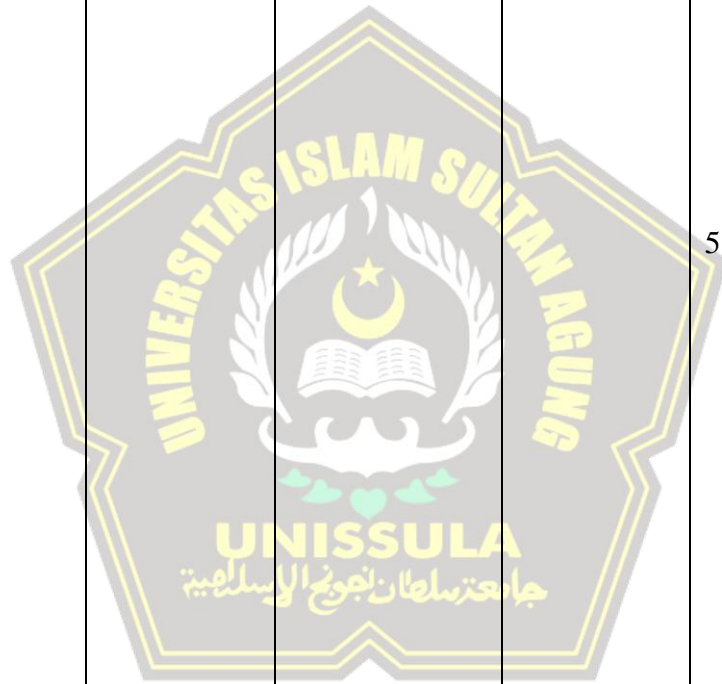
2.6 Penelitian Terdahulu

Bagian ini menyajikan rangkuman sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada sektor publik maupun swasta dalam kurun waktu 2022–2024.

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

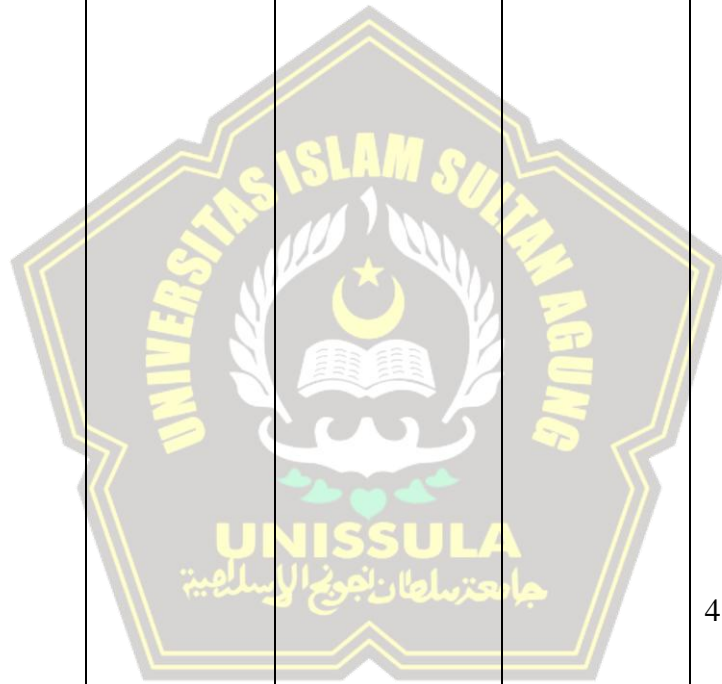
No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Wahyuni dan Arya Arpris Pangestu (2024)	Factors Influencing Internet Financial Reporting Quality: Audit Opinion as a Moderator	Variabel Dependen: Kualitas Internet Financial Reporting (IFR) Variabel Independen: 1. Debt Financing Ratio 2. Ukuran Pemerintah Daerah 3. Kinerja Keuangan	Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda serta <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> .	1. Debt Financing Ratio tidak berpengaruh terhadap kualitas Internet Financial Reporting (IFR). 2. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas IFR. 3. Kinerja Keuangan berpengaruh

			<p>Variabel</p> <p>Moderasi (M):</p> <p>Opini Audit</p>		<p>positif dan signifikan terhadap kualitas IFR.</p> <p>4. Opini Audit tidak berpengaruh langsung terhadap IFR.</p> <p>5. Sebagai variabel moderasi, Opini Audit memperkuat pengaruh Kinerja Keuangan terhadap IFR.</p> <p>6. Sebaliknya, Opini Audit memperlema</p>
--	--	--	---	--	--



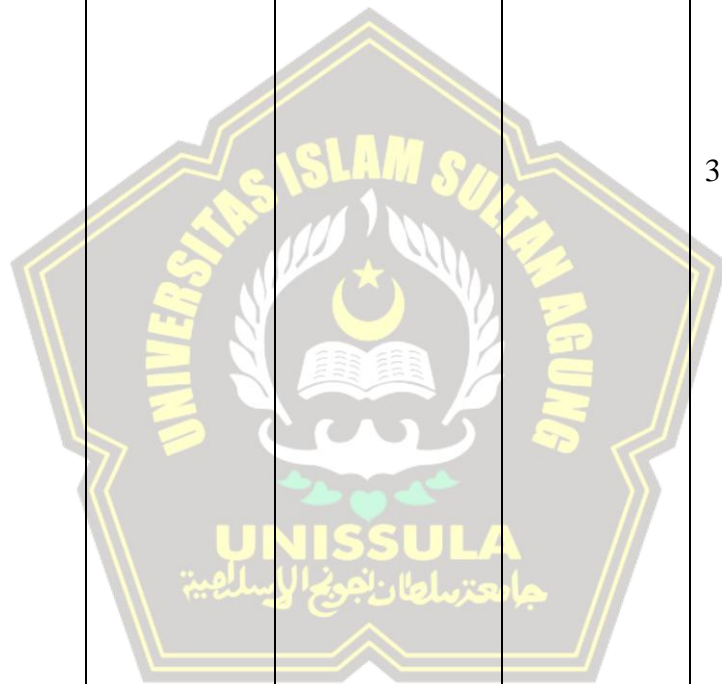
					h pengaruh Debt Financing Ratio dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap IFR.
2.	Sri Wahyuni Wulandari dan Erna Sulistiyowati (2024)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Belanja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Internet Financial Reporting Pemerintah	Variabel Dependen: Pelaksanaan Internet Financial Reporting Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1. Ukuran Pemerintah	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda.	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan Internet Financial Reporting. 2. Ukuran Pemerintah berpengaruh negatif

		Provinsi di Indonesia	2. Belanja Pemerintah		<p>signifikan terhadap pelaksanaan Internet Financial Reporting.</p> <p>3. Belanja Pemerintah tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Internet Financial Reporting.</p> <p>4. Secara simultan, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Belanja Pemerintah</p>
--	--	--------------------------	--------------------------	--	---

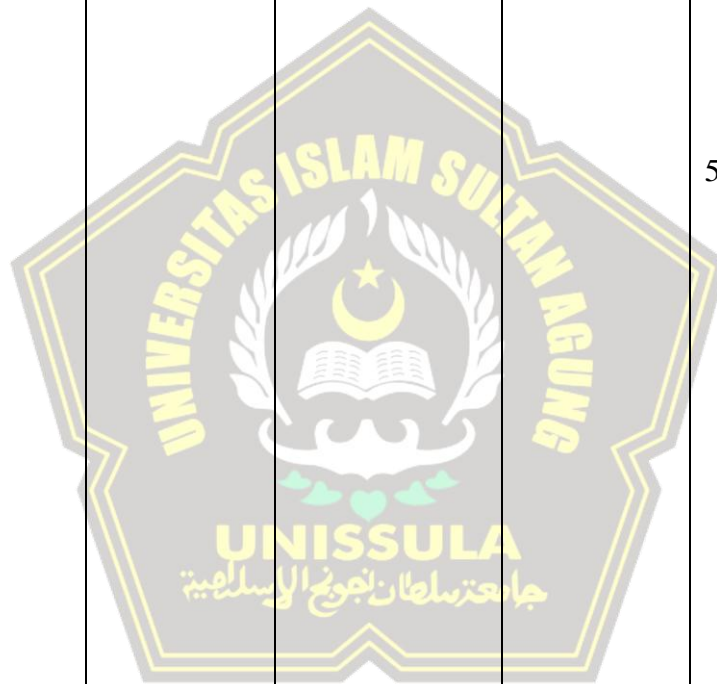


					berpengaruh terhadap pelaksanaan Internet Financial Reporting Pemerintah Provinsi di Indonesia.
3.	A Winangsih & Rigel Nurul Fathah (2023)	Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel Dependen: Internet Financial Reporting Variabel Independen: 1. Belanja Daerah 2. Jumlah Penduduk 3. Opini Audit	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal.	1. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting pada website pemerintah daerah di Indonesia. 2. Jumlah penduduk tidak

			4. Kekayaan Daerah		berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting pada website pemerintah daerah di Indonesia.
					3. Opini audit berpengaruh positif terhadap Internet Financial Reporting pada website pemerintah daerah di Indonesia.
					4. Kekayaan daerah berpengaruh



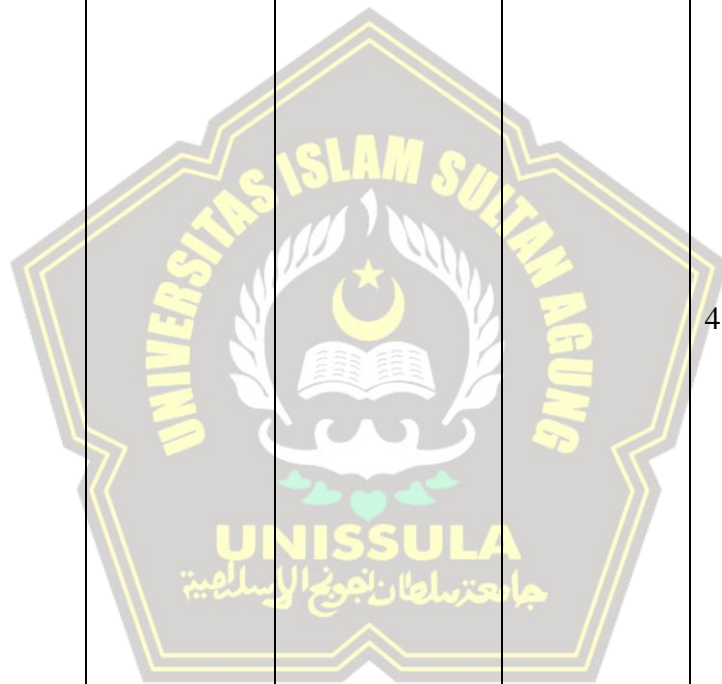
					<p>negatif terhadap Internet Financial Reporting pada website pemerintah daerah di Indonesia.</p> <p>5. Secara keseluruhan, model menjelaskan bahwa variabel-variabel independen memberikan kontribusi sebesar 22,6% terhadap variasi</p>
--	--	--	--	--	---



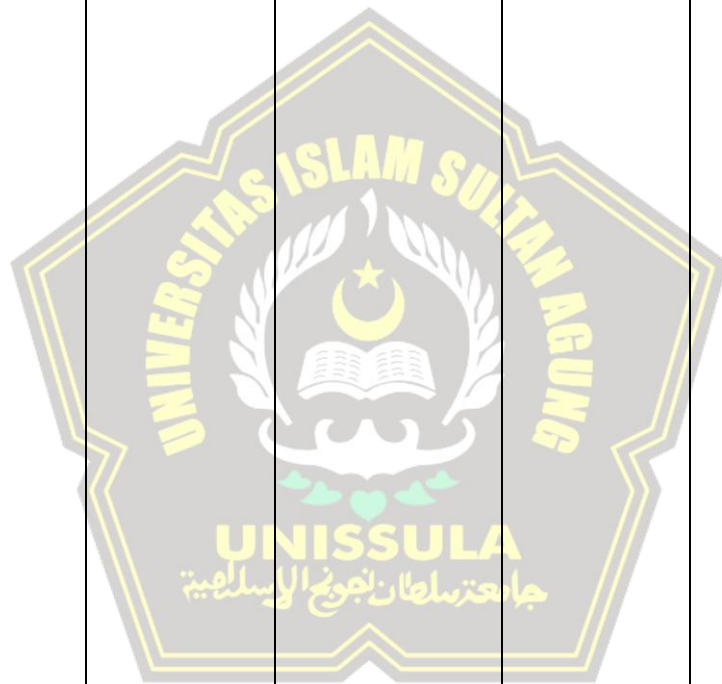
					Internet Financial Reporting pada pemerintah daerah.
4.	Ferryansah, Einde Evana, dan Fitra Dharma (2023)	Analysis of Regional Financial Report Disclosure Factors: A Literature Review	Variabel Dependen: Disclosure Of Regional Government Financial Reports Variabel Independen: Audit Findings, Independence Ratio, Intergovernme ntal Revenue, Political Pressure,	Penelitian ini menggunak an metode literature review kualitatif dengan menelaah berbagai jurnal yang terindeks SINTA periode 2014–2023.	1. Audit findings dan audit opinion berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkap an laporan keuangan pemerintah daerah; opini WTP mendorong peningkatan transparansi.

			<p>Characteristics Of Local Government, Regional Wealth, Population Tidak Terdapat Variabel Mediasi Atau Moderasi Secara Eksplisit.</p>		<p>2. Independenc e ratio berpengaruh positif terhadap pengungkap an laporan keuangan; semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, semakin besar tingkat keterbukaan laporan keuangan.</p> <p>3. Intergovern mental revenue berpengaruh positif</p>
--	--	--	---	--	---

					<p>terhadap pengungkapan laporan keuangan karena meningkatnya tekanan transparansi dari pemerintah pusat.</p> <p>4. Political pressure berpengaruh terhadap keterbukaan laporan keuangan; tekanan politik mendorong pemerintah daerah</p>
--	--	--	--	--	---



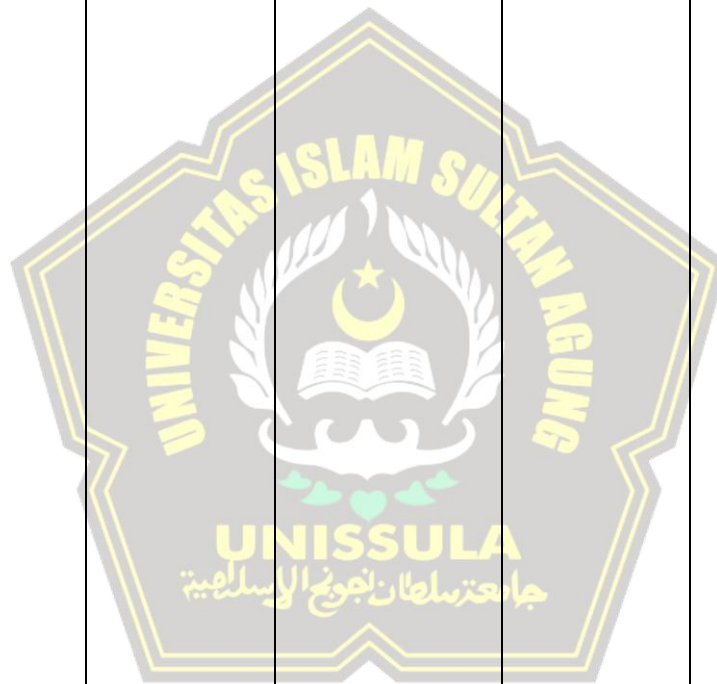
					<p>meningkatkan transparansi.</p> <p>5. Population berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan; semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi tuntutan transparansi publik.</p> <p>6. Regional wealth berpengaruh positif</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>terhadap keterbukaan laporan keuangan; daerah dengan kekayaan tinggi memiliki kemampuan lebih besar dalam menyediakan informasi keuangan secara transparan.</p>
5.	Anastasia Yaniarwana Sarumaha, Wiwik Andriani, Rasyidah	Pengaruh Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah, dan Opini Audit	Variabel Dependen: Aksesibilitas Internet Financial Reporting	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan	1. Pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

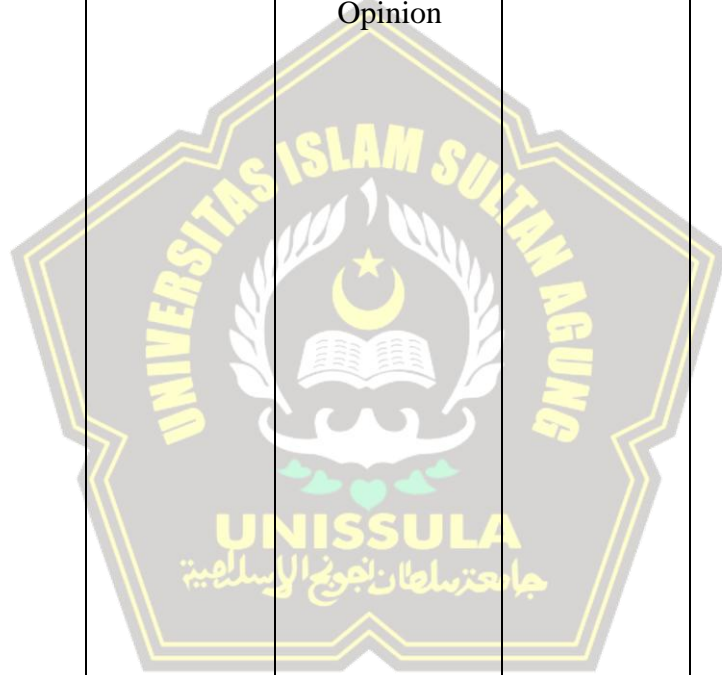
	<p>Mustika, dan Zahara (2024)</p>	<p>terhadap Aksesibilita s Internet Financial Reporting pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan</p>	<p>Variabel Independen: 1. Pendapatan Perkapita 2. Belanja Daerah 3. Opini Audit</p>	<p>analisis regresi linier berganda.</p>	<p>aksesibilitas Internet Financial Reporting pada pemerintah kabupaten/k ota di Sumatera Selatan. 2. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting pada pemerintah kabupaten/k</p>
--	---	---	--	--	---

					<p>ota di Sumatera Selatan.</p> <p>3. Opini audit tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.</p> <p>4. Secara simultan, pendapatan perkapita, belanja daerah, dan</p>
--	--	--	--	--	--

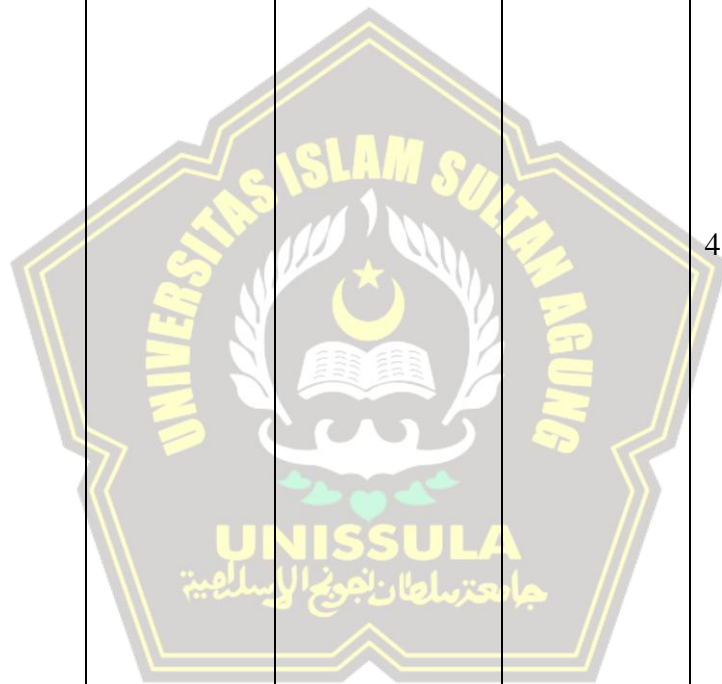


					<p>opini audit berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas Internet Financial Reporting pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.</p>
6.	<p>Sri Rahayu dan Farida Wahyu Nur Khasanah (2022)</p>	<p>Internet Financial Reporting: In the Case of District and City Governments in Central Java</p>	<p>Variabel Dependen: Internet Financial Reporting (IFR)</p> <p>Variabel Independen:</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data panel dan</p>	<p>1. Regional wealth tidak berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting pada pemerintah</p>

		Province, Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regional Wealth 2. Local Governme nt Size 3. Leverage 4. Audit Opinion 	teknik analisis regresi <i>Fixed Effect</i> <i>Model</i>	kabupaten dan kota di Jawa Tengah. 2. Local government size berpengaruh positif signifikan terhadap Internet Financial Reporting pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. 3. Leverage tidak berpengaruh
--	--	------------------------	--	--	---

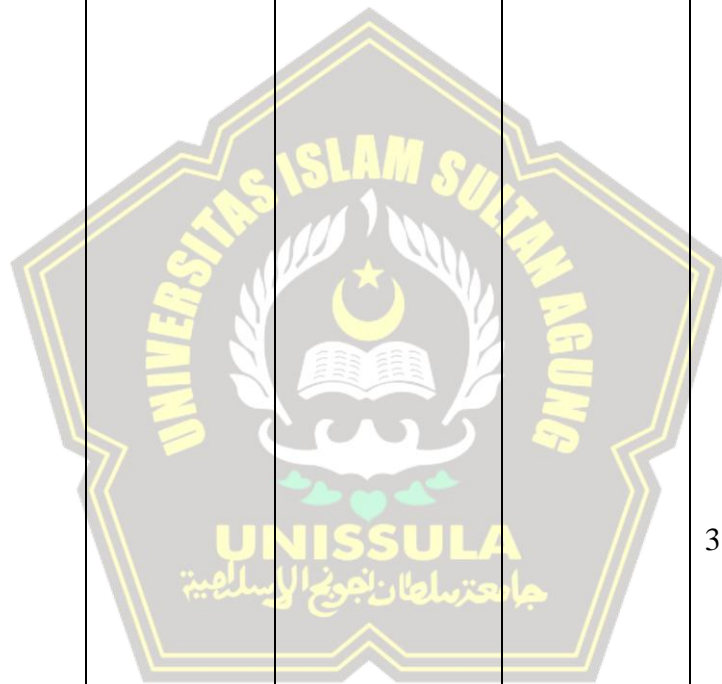


					<p>terhadap Internet Financial Reporting pada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.</p> <p>4. Audit opinion berpengaruh positif signifikan terhadap Internet Financial Reporting pada pemerintah kabupaten dan kota di</p>
--	--	--	--	--	--



					Jawa Tengah.
7.	Edy Suprianto dan Ahmad Salim (2024)	The Effect of Local Government Wealth on Internet Financial Reporting (IFR) Compliance with Local Geographic as a Moderation Variable: A New Institutional Theory Approach	Variabel Dependen: Internet Financial Reporting (IFR) Compliance Variabel Independen: Local Government Wealth Variabel Moderasi: Local Geographic	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda.	1. Local government wealth berpengaruh positif signifikan terhadap Internet Financial Reporting (IFR) compliance pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera. 2. Local geographic memperl lemah pengaruh

					<p>local government wealth terhadap Internet Financial Reporting (IFR) compliance pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera.</p> <p>3. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terpencil atau sulit dijangkau secara geografis</p>
--	--	--	--	--	---

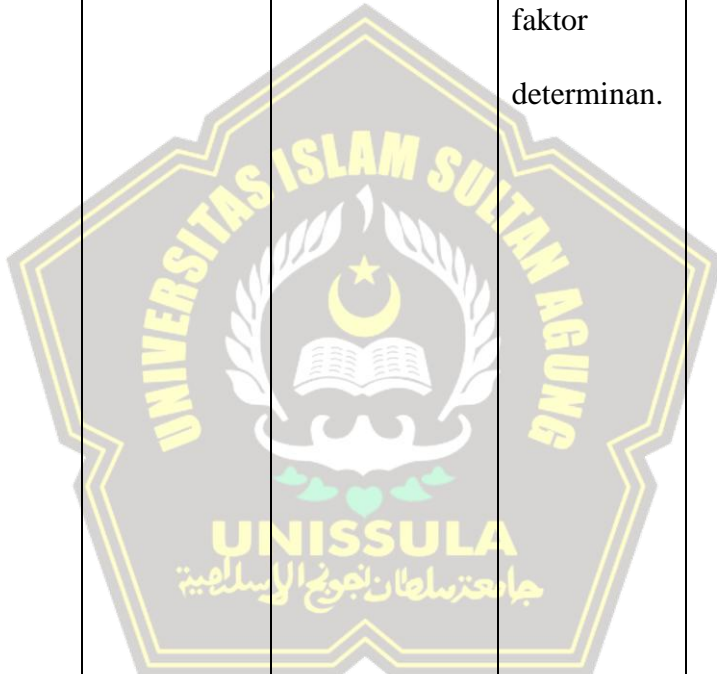


					<p>suatu daerah, maka tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan Internet Financial Reporting (IFR) cenderung menurun meskipun memiliki tingkat kekayaan yang tinggi.</p>
8.	Roviko Erni Anisaputri (2022)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah,	Variabel Dependen: Publikasi Laporan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	1. Kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan

		<p>Jumlah Penduduk, dan Opini Audit terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet</p> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Daerah 2. Belanja Daerah 3. Jumlah Penduduk 4. Opini Audit 	<p>dengan analisis regresi logistik.</p>	<p>terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. 3. Jumlah penduduk tidak berpengaruh
--	--	---	---	--	---

					<p>terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.</p> <p>4. Opini audit tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.</p>
9.	Triana Saraswati, Laeli Budiarti & Yudha Aryo	Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan	Dependen: Publikasi Laporan Keuangan Online	Kuantitatif — content analysis pada publikasi LKPD di	1. Ditemukan bahwa Opini Audit berpengaruh positif terhadap

	Sudibyو (2023)	Faktor yang Memengaru hinya	Independen: 1. Opini Audit 2. Pengeluara n Daerah 3. Pendapatan Per Kapita.	situs resmi pemda; regresi berganda untuk menguji faktor- faktor determinan.	publikasi laporan keuangan di internet. 2. Variabel pengeluaran daerah dan pendapatan per kapita diuji tetapi hasilnya tidak konsisten / tidak signifikan pada beberapa spesifikasi model.
--	-------------------	-----------------------------------	---	--	--



2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pusat. Daerah dengan PAD yang tinggi memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar, sehingga lebih mampu menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan transparansi keuangan melalui media digital. Selain itu, tingginya PAD sering kali menimbulkan ekspektasi masyarakat yang lebih besar terhadap keterbukaan informasi keuangan daerah, mendorong pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitasnya melalui publikasi *Internet Financial Reporting* (IFR).

Dalam kerangka teori legitimasi, PAD berhubungan dengan upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan legitimasi sosial di mata publik. Pemerintah daerah dengan tingkat PAD tinggi dihadapkan pada tekanan publik yang lebih kuat untuk menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara efektif dan transparan (Ogunode, 2022). Oleh karena itu, pengungkapan laporan keuangan melalui IFR menjadi salah satu cara untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah (Inten Meutia et al., 2022)

Hasil penelitian terdahulu juga mendukung hubungan ini. Wulandari dan Sulistyowati (2024) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IFR

karena daerah dengan pendapatan tinggi cenderung berupaya menjaga kepercayaan publik melalui transparansi digital. Hasil serupa diperoleh oleh Roviko (2022) dan Triana et al. (2023). Namun, Sarumaha et al. (2024) menemukan pengaruh negatif antara PAD dan IFR, sementara Awinangsih dan Fathah (2023) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR. Perbedaan hasil ini memperkuat perlunya penelitian lanjutan dalam konteks daerah di Provinsi Jawa Tengah.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

2.7.2 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)

Kekayaan daerah menggambarkan total sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk aset tetap, investasi, maupun aset lancar. Daerah dengan tingkat kekayaan yang tinggi memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar untuk membiayai sistem pelaporan keuangan berbasis digital. Selain itu, kekayaan daerah yang tinggi juga menunjukkan kemampuan fiskal yang kuat, sehingga menimbulkan tekanan sosial agar pemerintah dapat menunjukkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab melalui IFR.

Berdasarkan teori legitimasi, kekayaan daerah memengaruhi perilaku pemerintah dalam mengungkapkan informasi keuangan secara daring. Pemerintah daerah yang memiliki aset dan sumber daya melimpah akan berusaha mempertahankan legitimasi publik dengan menunjukkan kinerja keuangan yang transparan (Zumratul Meini et al., 2023). Transparansi melalui IFR menjadi strategi

untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan memperlihatkan bahwa kekayaan daerah dikelola secara efisien dan akuntabel (*Accounting Analysis Journal*, 2024).

Penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam. Roviko (2022) dan Susanti et al. (2024) menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap IFR, sedangkan Awinangsih dan Fathah (2023) menemukan pengaruh negatif karena daerah kaya cenderung merasa tidak perlu menambah pengungkapan digital. Sementara itu, Suprianto dan Salim (2024) menyatakan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR, menunjukkan bahwa variabel ini masih perlu diuji kembali di berbagai wilayah dan periode yang berbeda.

H2: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

2.7.3 Pengaruh Opini Audit terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR)

Opini audit merupakan pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini audit menjadi indikator kredibilitas tata kelola keuangan daerah. Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) cenderung memiliki sistem pelaporan yang baik dan komitmen terhadap transparansi publik. Oleh karena itu, opini audit diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan keuangan melalui IFR.

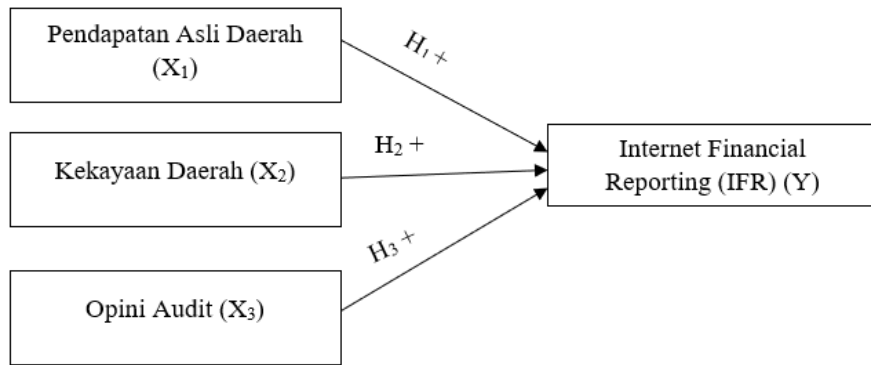
Dalam teori legitimasi, opini audit berfungsi sebagai simbol legitimasi formal bagi pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah memperoleh opini audit yang baik, seperti WTP, maka akan muncul dorongan untuk mempertahankan citra

positif dan legitimasi publik dengan meningkatkan transparansi melalui IFR (Ogunode, 2022). Sebaliknya, jika opini yang diterima kurang baik, pemerintah dapat berusaha memperbaiki reputasinya dengan lebih terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan secara daring (Wahyuni & Arpris Pangestu, 2024b).

Penelitian terdahulu mendukung hubungan positif ini. Triana et al. (2023) dan Fitri & Pangestu (2024) menemukan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap IFR. Namun, Roviko (2022) dan Sarumaha et al. (2024) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap IFR, sementara Wahyuni dan Pangestu (2024) menemukan arah pengaruh negatif ketika opini audit berperan sebagai variabel moderasi. Hasil-hasil tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi empiris yang menarik untuk diuji kembali dengan data terbaru periode 2022–2024.

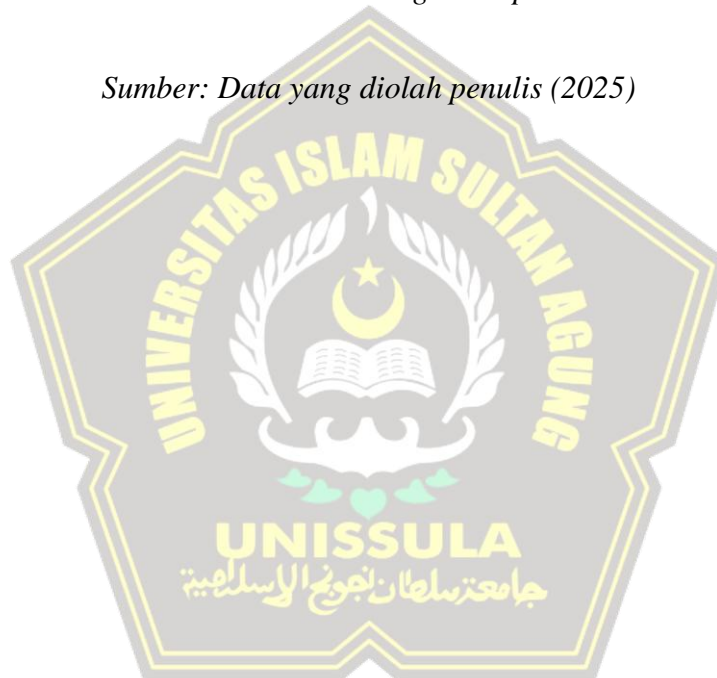
H3: Opini audit berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR).

2.8 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data yang diolah penulis (2025)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-verifikatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan menganalisis hubungan antarvariabel yang diukur secara numerik. Pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori yang telah ada melalui pengumpulan data empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), kekayaan daerah, dan opini audit terhadap tingkat *Internet Financial Reporting (IFR)* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berjumlah 35 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) berdasarkan data resmi Kementerian Dalam Negeri tahun 2025. (Terlampir dalam lampiran 1).

3.2.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus (sampling jenuh), yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya relatif terbatas (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, jumlah sampel penelitian ini adalah 35 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022–2024 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
2. Website resmi pemerintah kabupaten/kota untuk mengamati tingkat *Internet Financial Reporting* (IFR).
3. Data pendukung dari Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan situs resmi masing-masing pemerintah daerah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi, yaitu dengan mengakses dan mengumpulkan laporan keuangan, hasil audit BPK, serta dokumen resmi pemerintah daerah yang tersedia secara online.

2. Observasi non-partisipan, yaitu pengamatan langsung terhadap situs web resmi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sejauh mana pengungkapan IFR dilakukan.
3. Studi pustaka, yaitu penelusuran teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat dasar teoritis.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap variabel yang digunakan, berikut adalah definisi operasional setiap variabel dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Rumus Pengukuran	Skala	Sumber Data	Referensi
1.	<i>Internet Financial Reporting (Y)</i>	Ketersediaan informasi keuangan di website resmi Pemda: 1) LKPD 2) APBD	IFR Score = Jumlah informasi keuangan yang tersedia di website Pemda. Setiap item diberi skor 1 (tersedia) atau	Ordinal / Interval	Website resmi Pemerintah Daerah (Bagian Keuangan / BPKAD)	Rahayu & Nur Khasanah (2022) Saraswati et al. (2023)

		3) Realisasi Anggaran	0 (tidak tersedia). Total skor = jumlah seluruh item (0-4). Opsional: (Jumlah item tersedia ÷ 4) × 100%			
2.	Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD = Total Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam LKPD tahun berjalan. Umumnya dinyatakan dalam log natural (Ln PAD) untuk	Rasio (log)	LKPD Pemerintah Daerah / DJPK Kemenkeu	Wulandari & Sulistyowati (2024)

			menormalkan data.			
3.	Kekayaan Daerah (X ₂)	Total Aset / Kekayaan Daerah	Kekayaan Daerah = Total Aset Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan (LKPD). Dapat menggunakan log natural (Ln Total Aset) atau rasio aset tetap terhadap total aset	Rasio (log)	LKPD Pemerintah Daerah / BPK	Susanti et al. (2024) Suprianto & Salim (2024)
4.	Opini Audit (X ₃)	Jenis opini audit BPK atas LKPD	Pengukuran dilakukan menggunakan	Ordinal / Nominal	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI	Wahyuni & Arpris Pangestu (2024)

			variabel dummy: 1. Wajar Tanpa Pengecual ian (WTP) = 1 2. Selain WTP (WDP, TMP, Disclaime r) = 0			Ferrysana h et al. (2023)
--	--	--	---	--	--	---------------------------------

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, dan Opini Audit terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) pada pemerintah daerah. Metode analisis meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari masing-masing variabel penelitian, baik variabel dependen maupun independen. Statistik deskriptif yang dihitung meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi umum pelaksanaan *Internet Financial Reporting* (IFR) serta tingkat PAD, kekayaan daerah, dan opini audit pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian.

Hasil analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui sejauh mana data menyebar dan apakah terdapat nilai ekstrim (*outlier*). Nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan kecenderungan pusat data, sedangkan standar deviasi menggambarkan variasi data terhadap nilai rata-rata. Analisis ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi IFR dan faktor-faktor yang memengaruhinya di pemerintah daerah Jawa Tengah.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan validitas model regresi linear berganda, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas (Kolmogorov–Smirnov Test)

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Distribusi normal diperlukan agar hasil uji statistik t dan F valid.

Pengujian normalitas dilakukan dengan Kolmogorov–Smirnov Test (K–S) serta didukung oleh grafik histogram dan *Normal P–P Plot*.

Kriteria keputusan:

- Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ → data residual berdistribusi normal.
- Jika nilai *Asymp. Sig.* $< 0,05$ → data residual tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas (Tolerance & VIF)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah antarvariabel independen terjadi korelasi yang tinggi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan hasil regresi menjadi tidak stabil.

Dalam SPSS, pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* pada menu *Collinearity Diagnostics*.

Kriteria keputusan:

- Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 .

3. Uji Heteroskedastisitas (Glejser Test)

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual antar pengamatan dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan metode Glejser melalui regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Kriteria keputusan:

- Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai *Sig.* masing-masing variabel $> 0,05$.
- Jika *Sig.* $< 0,05$ \rightarrow terdapat heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi (Durbin–Watson Test)

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi biasanya muncul pada data time series atau panel. Pengujian dilakukan menggunakan Durbin–Watson (DW Test).

Kriteria keputusan:

- Jika nilai DW berada di antara d_U dan $4 - d_U$ \rightarrow tidak ada autokorelasi.
- Jika $DW < d_L$ atau $DW > 4 - d_L$ \rightarrow terdapat autokorelasi.

Model dianggap layak apabila seluruh asumsi terpenuhi.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan melalui pendekatan regresi linear berganda guna menganalisis hubungan antara variabel independen dan IFR. Secara matematis, model penelitian dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$IFR = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 ASSET + \beta_3 AUD + \epsilon$$

Keterangan:

- IFR = Internet Financial Reporting
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- ASSET = Kekayaan Daerah
- AUD = Opini Audit
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi
- ϵ = Error

3.6.4 Uji Parsial (t-Test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap IFR.

Kriteria keputusan:

- Jika nilai *Sig. (p-value)* < 0,05 → variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IFR.

- Jika nilai *Sig. (p-value)* $\geq 0,05 \rightarrow$ tidak berpengaruh signifikan.

3.6.5 Uji Simultan (F-Test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap IFR.

Kriteria keputusan:

- Jika nilai *Sig. F* $< 0,05 \rightarrow$ secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IFR.
- Jika *Sig. F* $\geq 0,05 \rightarrow$ tidak ada pengaruh simultan.

3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi IFR yang dapat dijelaskan oleh variabel PAD, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit.

Nilai R^2 berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh pemerintah daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, sehingga total objek penelitian berjumlah 35 pemerintah daerah. Seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan teknik sensus (sampling jenuh), mengingat jumlah populasi yang relatif terbatas dan memungkinkan dilakukan pengamatan secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu merepresentasikan kondisi aktual penerapan transparansi keuangan berbasis internet pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari 35 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2024. Dengan periode pengamatan selama tiga tahun, jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 105 observasi (35 pemerintah daerah \times 3 tahun). Penggunaan data panel bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan *Internet Financial Reporting* (IFR) antar daerah dan antar periode waktu.

Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang beragam antar kabupaten/kota. Perbedaan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai kekayaan daerah, serta kapasitas

pengelolaan keuangan publik menciptakan variasi kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kondisi ini menjadikan Jawa Tengah sebagai konteks yang relevan untuk menguji determinan *Internet Financial Reporting* (IFR) pada sektor publik daerah. Keberagaman karakteristik fiskal antar daerah juga berpotensi memengaruhi sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan media internet sebagai sarana penyampaian informasi keuangan kepada publik (Rahayu & Nur Khasanah, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Data Pendapatan Asli Daerah dan kekayaan daerah diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk periode 2022–2024. Sementara itu, data Internet Financial Reporting (IFR) diperoleh melalui observasi langsung terhadap situs web resmi masing-masing pemerintah daerah, dengan menilai ketersediaan informasi keuangan yang dipublikasikan secara daring. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selama periode pengamatan, seluruh pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan prinsip akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, kondisi tersebut juga

menyebabkan variabel opini audit tidak memiliki variasi antar sampel, sehingga tidak dapat dianalisis lebih lanjut dalam model regresi. Oleh karena itu, analisis pengaruh terhadap Internet Financial Reporting dalam penelitian ini difokuskan pada variabel Pendapatan Asli Daerah dan Kekayaan Daerah sebagai faktor utama yang memiliki variasi data dan relevansi empiris.

Pada tahap analisis penelitian ini dilakukan penyempurnaan model pengujian untuk memastikan konsistensi penggunaan periode data pada seluruh variabel penelitian. Seluruh variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah (Total Aset), dan Opini Audit, serta variabel dependen *Internet Financial Reporting* (IFR), dianalisis menggunakan periode yang sama yaitu tahun 2022–2024 dengan total 105 observasi. Penyelarasan periode ini dilakukan agar model regresi yang digunakan memenuhi kaidah metodologi penelitian kuantitatif, khususnya dalam menjaga konsistensi struktur data dan meningkatkan validitas hasil pengujian. Dengan demikian, hasil analisis yang disajikan pada bab ini merupakan hasil pengolahan data yang telah disesuaikan secara metodologis dan siap untuk diinterpretasikan lebih lanjut.

4.2 Statistik Deskriptif

Tabel 4 1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IFR	105	3	4	3.92	.267

LN_PAD	105	25.45	28.69	26.8137	.44372
LN_ASET	105	28.54	30.95	29.1667	.44255
OPINI_AUDIT_DUMMY	105	0	1	.99	.098
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi variabel *Internet Financial Reporting* (IFR), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, dan Opini Audit. Statistik deskriptif dalam penelitian ini mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi, yang bertujuan untuk menunjukkan sebaran data dan kecenderungan masing-masing variabel pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2024.

Berdasarkan Tabel 4.1, seluruh variabel memiliki jumlah observasi (N) sebanyak 105, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang hilang (missing value) dalam penelitian ini. Jumlah observasi tersebut diperoleh dari 35 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diamati selama tiga tahun (2022–2024), sehingga menghasilkan 105 data panel.

Variabel *Internet Financial Reporting* (IFR) memiliki nilai minimum sebesar 3 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,92 dan standar deviasi sebesar 0,267. Nilai rata-rata yang mendekati angka maksimum menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah

telah menerapkan pengungkapan informasi keuangan berbasis internet pada tingkat yang relatif tinggi selama periode penelitian. Standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa variasi tingkat IFR antar pemerintah daerah dan antar tahun tidak terlalu besar, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar pemerintah daerah telah memiliki komitmen yang cukup baik terhadap transparansi informasi keuangan berbasis internet.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (LN_PAD) memiliki nilai minimum sebesar 25,45 dan maksimum sebesar 28,69, dengan rata-rata sebesar 26,8137 dan standar deviasi sebesar 0,44372. Perbedaan nilai minimum dan maksimum ini menunjukkan adanya variasi kapasitas fiskal antar pemerintah daerah. Daerah dengan nilai LN_PAD yang lebih tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli secara lebih optimal. Variasi ini penting dalam penelitian karena kapasitas fiskal seringkali dikaitkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem informasi dan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan.

Selanjutnya, variabel Kekayaan Daerah (LN_ASET) memiliki nilai minimum sebesar 28,54 dan maksimum sebesar 30,95, dengan nilai rata-rata sebesar 29,1667 dan standar deviasi sebesar 0,44255. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat akumulasi aset antar pemerintah daerah selama periode pengamatan. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi dalam skala ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Variasi kekayaan daerah ini secara teoritis dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam

menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan Internet Financial Reporting.

Adapun variabel Opini Audit yang diukur menggunakan variabel dummy memiliki nilai minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 1, dengan rata-rata sebesar 0,99 dan standar deviasi sebesar 0,098. Nilai rata-rata yang sangat mendekati 1 menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah selama periode penelitian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rendahnya variasi pada variabel ini mengindikasikan bahwa perbedaan opini audit antar pemerintah daerah relatif kecil dalam periode pengamatan, yang nantinya dapat memengaruhi kekuatan variabel ini dalam menjelaskan variasi *Internet Financial Reporting*.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa meskipun tingkat penerapan IFR relatif tinggi, masih terdapat variasi dalam kapasitas fiskal dan kekayaan daerah antar pemerintah daerah. Variasi tersebut menjadi dasar penting dalam menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap *Internet Financial Reporting* dalam analisis regresi pada subbab berikutnya.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan dalam analisis regresi. Pemenuhan asumsi klasik bertujuan agar estimasi parameter yang diperoleh bersifat tidak bias, konsisten, dan efisien, sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara valid. Dalam penelitian ini, pengujian

asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.3.1 Uji Normalitas

Tabel 4 2 Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*)

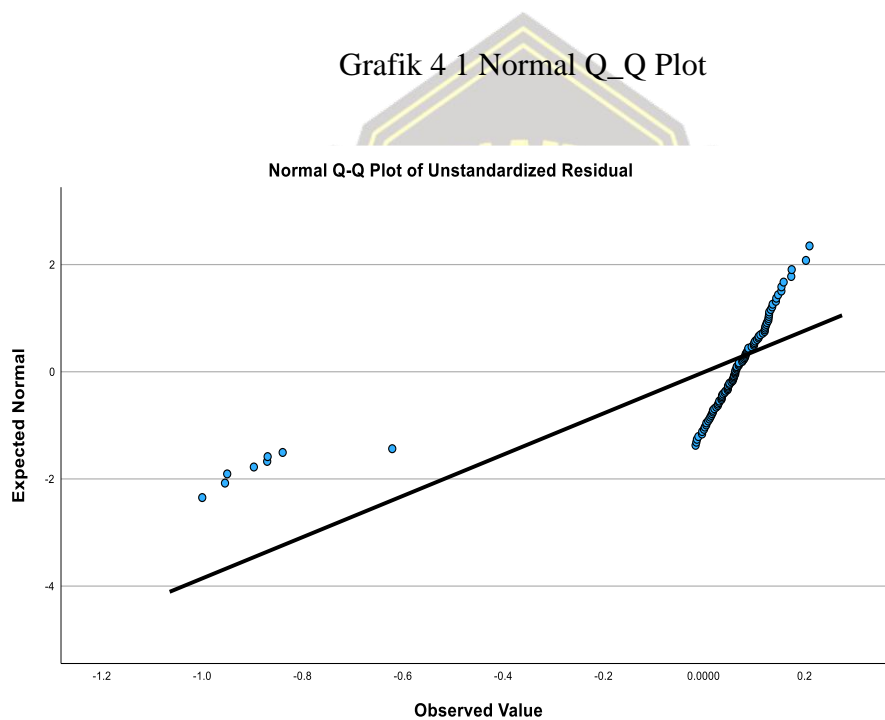
Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.396	105	<.001	.485	105	<.001
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Normalitas residual diperlukan agar pengujian statistik parametrik, seperti uji t dan uji F, dapat menghasilkan estimasi yang efisien dan tidak bias. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov serta didukung oleh analisis grafik Normal Q–Q Plot dan Detrended Normal Q–Q Plot.

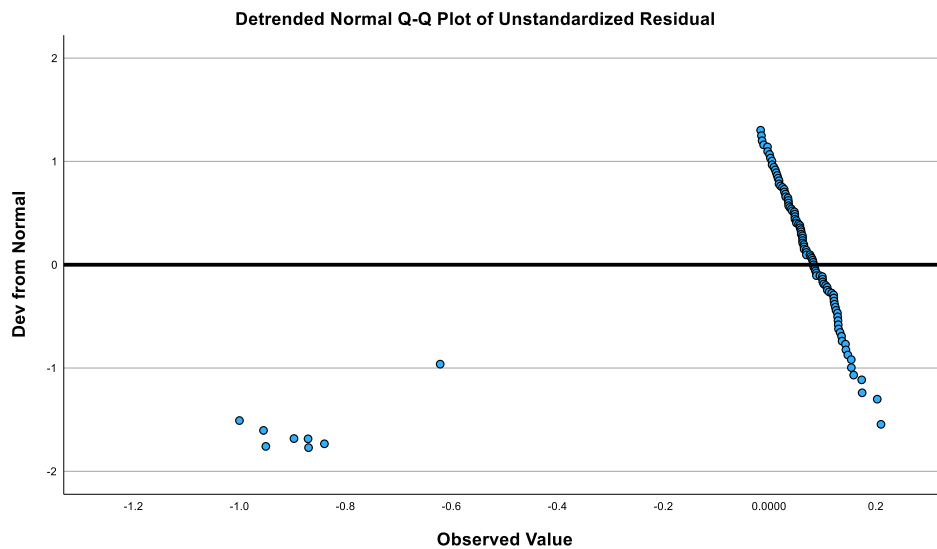
Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk pada Tabel 4.2, nilai signifikansi menunjukkan nilai kurang dari 0,05, yang secara statistik mengindikasikan bahwa residual tidak berdistribusi normal secara sempurna. Secara teoritis, hasil tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari asumsi normalitas apabila ditinjau dari pendekatan statistik murni.

Namun demikian, jumlah observasi dalam penelitian ini sebesar 105, yang termasuk dalam kategori sampel besar. Dalam kondisi jumlah sampel yang relatif besar, distribusi estimasi parameter regresi akan cenderung mendekati distribusi normal sebagaimana dijelaskan dalam *Central Limit Theorem*. Teorema ini menyatakan bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati normal seiring bertambahnya jumlah observasi, meskipun data awal tidak sepenuhnya berdistribusi normal.



Sumber: Data output SPSS Versi 31, 2025

Grafik 4 2 Detrended Normal Q_Q Plot



Sumber: Data output SPSS Versi 31, 2025

Analisis visual melalui grafik Normal Q-Q Plot berdasarkan grafik 4.1 yang menampilkan grafik Normal P-P Plot dan grafik 4.2 yang menampilkan grafik Detrended Normal Q-Q Plot, titik-titik residual secara umum mengikuti arah garis diagonal, meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada bagian tertentu. Pola penyebaran titik yang relatif mendekati garis diagonal menunjukkan bahwa distribusi residual masih dapat dikatakan mendekati normal secara visual.

Dengan mempertimbangkan ukuran sampel yang besar serta hasil analisis grafik, maka asumsi normalitas dalam penelitian ini dinilai masih dapat diterima dan model regresi tetap layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi dan mempersulit interpretasi hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada tabel *Coefficients*.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Diagnostics ^a							
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	LN_PAD	LN_ASET	OPINI_AUDIT_DUMM_Y
1	1	3.993	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.007	23.619	.00	.00	.00	1.00
	3	.000	162.610	.95	.15	.05	.00
	4	4.804E-5	288.296	.05	.85	.95	.00

a. Dependent Variable: IFR

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.3, nilai VIF untuk variable Pendapatan Asli Daerah (LN_PAD) sebesar 2,835, Kekeayaan Daerah (LN_ASET) sebesar 2,833, dan Opini Audit (OPINI_AUDIT_DUMMY) sebesar 1,003. Seluruh nilai VIF berada jauh di bawah batas kritis 10, serta nilai Tolerance masing-masing variabel berada di atas 0,10.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang berlebihan antar variabel independen dalam model penelitian ini. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas dan setiap variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen secara relatif independen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur model yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi asumsi bebas multikolinearitas, sehingga estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan dengan lebih stabil dan reliabel.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.061	1.743		2.329	.022
	LN_PAD	.221	.098	.368	2.252	.026

	LN_ASET	-.205	.098	-.340	-2.083	.040
	OPINI_AUDIT	-.090	.265	-.033	-.338	.736
	_DUMMY					

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Berdasarkan hasil uji Glejser pada Tabel 4.4, variabel pendapatan asli daerah dan kekayaan daerah menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Sementara itu, variabel opini audit tidak menunjukkan signifikansi.

Secara teoritis, keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi parameter tetap tidak bias namun menjadi kurang efisien. Dalam konteks penelitian ini, karakteristik data keuangan pemerintah daerah yang bersifat heterogen antar wilayah dan antar periode dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya variasi residual.

Meskipun demikian, penelitian tetap melanjutkan analisis regresi dengan mempertimbangkan jumlah sampel yang relatif besar serta tujuan penelitian yang lebih menitikberatkan pada arah dan signifikansi hubungan antar variabel.

Interpretasi hasil regresi dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan temuan pada uji asumsi klasik ini.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.225 ^a	.050	.022	.264	2.112
a. Predictors: (Constant), OPINI_AUDIT_DUMMY, LN_ASET, LN_PAD					
b. Dependent Variable: IFR					

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya dalam model regresi. Autokorelasi umumnya menjadi perhatian utama pada data runtut waktu (*time series*), namun dalam penelitian yang menggunakan data panel pooled seperti penelitian ini, pengujian autokorelasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa residual bersifat independen. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW) yang diperoleh dari tabel Model Summary pada hasil regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,112. Nilai tersebut berada pada kisaran antara -2 sampai +2, yang secara umum digunakan sebagai indikator tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Secara teoritis, nilai Durbin-Watson yang mendekati angka 2 menunjukkan bahwa residual tidak memiliki korelasi serial, baik positif maupun negatif. Nilai 2,112 yang relatif dekat dengan angka 2 mengindikasikan bahwa residual dalam model regresi penelitian ini bersifat independen antar observasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi. Pemenuhan asumsi ini semakin memperkuat kelayakan model regresi untuk digunakan dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit terhadap *Internet Financial Reporting*.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.6 Model Summary

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.225 ^a	.050	.022	.264	2.112
a. Predictors: (Constant), OPINI_AUDIT_DUMMY, LN_ASET, LN_PAD					
b. Dependent Variable: IFR					

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan serta pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah (Total Aset), dan Opini Audit terhadap variabel dependen yaitu *Internet Financial Reporting* (IFR). Pengujian dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan jumlah observasi sebanyak 105, yang diperoleh dari 35 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2024.

Penggunaan regresi linear berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan masing-masing variabel independen terhadap IFR serta melihat seberapa besar kontribusi ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan variasi tingkat pengungkapan informasi keuangan berbasis internet.

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai R sebesar 0,225 menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berada pada kategori hubungan yang relatif rendah. Nilai ini menggambarkan bahwa secara umum keterkaitan antara PAD, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit terhadap IFR tidak terlalu kuat dalam periode penelitian.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,022 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model, kemampuan model dalam menjelaskan variasi IFR relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang kemungkinan lebih

dominan dalam memengaruhi tingkat Internet Financial Reporting, seperti faktor kebijakan internal pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, kesiapan teknologi informasi, maupun tekanan regulasi dan pengawasan publik.

Nilai Durbin-Watson sebesar 2,112 menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Nilai tersebut mendekati angka 2 yang secara teoritis menunjukkan bahwa residual bersifat independen antar observasi. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 4 7 COEFFICIENTS

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.061	1.743		2.329	.022		
	LN_PAD	.221	.098	.368	2.252	.026	.353	2.835
	LN_ASET	-.205	.098	-.340	-2.083	.040	.353	2.833
	OPINI_AU DIT_DUM MY	-.090	.265	-.033	-.338	.736	.997	1.003

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak IBM SPSS, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{IFR} = 4,061 + 0,221(\text{LN_PAD}) - 0,205(\text{LN_ASET}) - 0,090(\text{OPINI_AUDIT_DUMMY}) + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : *Internet Financial Reporting*

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi masing-masing variabel independent

LnPAD (X_1) : Log natural Pendapatan Asli Daerah

LnAset (X_2) : Log natural Total Aset Daerah

Opini Audit (X_3) : Opini Audit

ε : *Error*/Faktor Pengganggu

Persamaan regresi tersebut menunjukkan arah dan besaran pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *Internet Financial Reporting*, dengan penjelasan sebagai berikut.

Nilai konstanta sebesar 4,061 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen diasumsikan konstan, nilai IFR berada pada tingkat yang relatif tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah telah memiliki tingkat pengungkapan informasi keuangan berbasis internet yang cukup baik.

Koefisien LN_PAD sebesar 0,221 menunjukkan adanya hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah dan Internet Financial Reporting. Artinya, peningkatan kapasitas fiskal daerah cenderung diikuti dengan peningkatan transparansi informasi keuangan berbasis internet.

Koefisien LN_ASET sebesar -0,205 menunjukkan hubungan negatif antara Kekayaan Daerah dan IFR. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya total aset yang dimiliki daerah tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keterbukaan informasi keuangan melalui media internet.

Sementara itu, koefisien OPINI_AUDIT_DUMMY sebesar -0,090 menunjukkan bahwa perbedaan opini audit tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap nilai IFR dalam model ini.

4.5 Uji Parsial (t-Test)

Uji parsial (t-Test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen *Internet Financial Reporting* (IFR). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kekayaan Daerah terhadap IFR dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$)

Tabel 4 8 Hasil Uji Parsial (t-Test)

Coefficients ^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.061	1.743		2.329	.022
	LN_PAD	.221	.098	.368	2.252	.026
	LN_ASET	-.205	.098	-.340	-2.083	.040
	OPINI_AUDIT_DU MMY	-.090	.265	-.033	-.338	.736

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (LN_PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,026 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IFR. Dengan demikian, semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli, semakin besar pula kecenderungan daerah tersebut untuk meningkatkan transparansi keuangan berbasis internet.

Variabel Kekayaan Daerah (LN_ASET) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,040 yang juga lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap IFR, namun dengan arah hubungan negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan total aset tidak selalu diikuti dengan peningkatan transparansi informasi keuangan melalui internet.

Sementara itu, variabel Opini Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,736 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR. Tidak signifikannya variabel ini dapat dipahami mengingat sebagian besar pemerintah daerah dalam periode penelitian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga variasi data relatif kecil.

Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak secara otomatis meningkatkan tingkat pengungkapan informasi keuangan berbasis internet. Pengelolaan aset yang kompleks dan luas justru dapat menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyajian informasi keuangan yang tepat waktu dan mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, kekayaan daerah bukan merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya penerapan Internet Financial Reporting pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

4.6 Uji Simultan (F-Test)

Uji simultan (F-Test) digunakan untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah dan Kekayaan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR). Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan mengacu pada nilai signifikansi yang terdapat pada tabel ANOVA hasil pengolahan data menggunakan SPSS.

Tabel 4 9 Hasil Uji Simultan (*F-Test*)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.373	3	.124	1.789	.154 ^b
	Residual	7.018	101	.069		
	Total	7.390	104			
a. Dependent Variable: IFR						
b. Predictors: (Constant), OPINI_AUDIT_DUMMY, LN_ASET, LN_PAD						

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai F sebesar 1,789 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,154. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet Financial Reporting.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial terdapat variabel yang signifikan, namun secara bersama-sama ketiga variabel tersebut belum mampu menjelaskan variasi IFR secara kuat dalam periode penelitian. Hal ini memperkuat indikasi bahwa faktor lain di luar model kemungkinan memiliki peran yang lebih dominan dalam memengaruhi tingkat transparansi berbasis internet.

Selain itu, hasil uji simultan yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial terdapat variabel yang berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting, namun secara kolektif ketiga variabel tersebut belum mampu membentuk model yang kuat dalam menjelaskan variasi IFR secara menyeluruh. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik penerapan IFR yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan, tetapi juga oleh faktor non-keuangan. Dengan demikian, hasil uji F ini mengindikasikan bahwa model penelitian masih memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan berbasis internet.

4.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam model, yaitu LnPAD dan LnAset, dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen Internet Financial Reporting (IFR). Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel Model Summary dalam output SPSS yang menampilkan nilai R, R Square, Adjusted R Square, dan Standard Error of Estimate.

Tabel 4 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.225 ^a	.050	.022	.264	2.112

a. Predictors: (Constant), OPINI_AUDIT_DUMMY, LN_ASET, LN_PAD
b. Dependent Variable: IFR

Sumber: Data diolah SPSS Versi 31, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 5% variasi Internet Financial Reporting dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit dalam model penelitian ini.

Sementara itu, sebesar 95% variasi IFR dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan internal pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia, tingkat literasi digital, maupun tekanan regulasi eksternal.

Nilai koefisien determinasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena IFR secara komprehensif, sehingga penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang lebih representatif.

Nilai koefisien determinasi yang relatif kecil ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa model penelitian tidak relevan, melainkan menggambarkan bahwa fenomena Internet Financial Reporting merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional. Dalam konteks pemerintah daerah, tingkat transparansi berbasis internet dapat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, budaya organisasi, tekanan regulasi, maupun

partisipasi publik yang tidak seluruhnya tercermin dalam variabel keuangan yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil ini justru membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel tambahan yang mampu menjelaskan variasi IFR secara lebih luas.

4.8 Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan hasil pengujian empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kekayaan Daerah terhadap Internet Financial Reporting (IFR) pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang digunakan serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4.8.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR). Secara substantif, temuan ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal operasional memiliki peran strategis dalam mendorong implementasi transparansi berbasis digital pada pemerintah daerah. PAD merepresentasikan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan yang bersifat likuid dan fleksibel, sehingga dapat langsung dialokasikan untuk mendukung kebutuhan operasional, termasuk pengelolaan website resmi, pembaruan laporan keuangan, penyediaan dokumen

dalam format yang dapat diakses publik, serta pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah.

Dalam konteks pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024, perbedaan tingkat PAD antar kabupaten/kota menunjukkan adanya variasi kapasitas administratif dan kesiapan digital yang cukup signifikan. Daerah dengan PAD yang lebih tinggi cenderung memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan informasi publik. Oleh karena itu, hubungan positif antara PAD dan IFR dapat dimaknai bahwa transparansi digital bukan semata-mata hasil dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan konsekuensi dari kapasitas fiskal yang memadai untuk mengimplementasikannya secara konsisten.

Dalam perspektif teori legitimasi, temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi publik di era digital tidak hanya dibangun melalui simbol atau pernyataan formal, melainkan melalui tindakan nyata dalam menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses dan diperbarui secara berkala. Pemerintah daerah dengan PAD yang lebih tinggi menghadapi ekspektasi publik yang lebih besar terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga Internet Financial Reporting menjadi instrumen penting untuk mempertahankan legitimasi tersebut. Dengan demikian, pengaruh positif PAD terhadap IFR mencerminkan bahwa kapasitas fiskal operasional merupakan faktor yang mendukung efektivitas strategi legitimasi melalui transparansi digital.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Wahyuni Wulandari & Erna Sulistyowati (2024) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IFR. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal menjadi faktor pendorong bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi sebagai bentuk legitimasi publik. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anastasia Yaniarwana Sarumaha dkk. (2024) yang menemukan pengaruh negatif PAD terhadap IFR, serta penelitian Triana Saraswati dkk. (2023) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kapasitas fiskal terhadap transparansi berbasis internet sangat dipengaruhi oleh konteks wilayah, periode penelitian, serta karakteristik tata kelola masing-masing daerah.

Dengan demikian, dalam konteks Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024, PAD terbukti menjadi faktor yang memperkuat legitimasi pemerintah daerah melalui peningkatan transparansi digital.

4.8.2 Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekayaan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Internet Financial Reporting. Secara substantif, temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya total aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak secara otomatis mendorong peningkatan transparansi berbasis internet. Total aset dalam laporan keuangan daerah umumnya mencerminkan akumulasi sumber daya fisik seperti tanah, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya, yang bersifat administratif dan tidak selalu berkaitan langsung dengan kapasitas

operasional dalam pengelolaan sistem informasi publik. Oleh karena itu, peningkatan kekayaan daerah tidak serta-merta meningkatkan prioritas atau komitmen terhadap pengungkapan informasi keuangan secara daring.

Dalam konteks pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024, temuan negatif ini dapat dimaknai bahwa daerah dengan total aset yang lebih besar belum tentu memiliki orientasi kebijakan yang lebih kuat terhadap transparansi digital. Besarnya aset bisa saja mencerminkan skala pembangunan fisik atau luas wilayah administratif, namun tidak selalu diikuti dengan peningkatan investasi pada sistem teknologi informasi atau pengelolaan website resmi yang aktif dan informatif. Dengan demikian, hubungan negatif antara kekayaan daerah dan Internet Financial Reporting menunjukkan bahwa ukuran total aset bukan merupakan indikator yang secara langsung mencerminkan komitmen terhadap transparansi digital. Besarnya aset lebih menggambarkan kapasitas struktural dan administratif pemerintah daerah, sedangkan transparansi berbasis internet memerlukan orientasi kebijakan, pengelolaan sistem informasi, dan pembaruan data yang bersifat aktif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif teori legitimasi, hasil ini menunjukkan bahwa legitimasi publik tidak hanya dibangun melalui kepemilikan sumber daya ekonomi yang besar, tetapi melalui strategi komunikasi dan transparansi yang secara aktif dijalankan oleh pemerintah daerah. Daerah dengan aset besar mungkin telah memperoleh legitimasi melalui pembangunan fisik atau proyek infrastruktur, sehingga transparansi digital belum menjadi prioritas utama dalam

mempertahankan legitimasi tersebut. Sebaliknya, daerah dengan aset lebih kecil justru dapat menjadikan Internet Financial Reporting sebagai sarana strategis untuk menunjukkan akuntabilitas dan memperoleh kepercayaan publik. Dengan demikian, pengaruh negatif kekayaan daerah terhadap IFR mengindikasikan bahwa legitimasi dalam praktik pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sumber daya, melainkan oleh bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Roviko Erni Anisaputri (2022) serta Suprianto & Salim (2024) yang menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap IFR. Penelitian tersebut berargumen bahwa semakin besar aset, semakin besar pula tekanan publik untuk meningkatkan transparansi. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian A Winangsih & Rigel Nurul Fathah (2023) yang menemukan pengaruh negatif kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan berbasis internet. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak selalu dibangun melalui transparansi digital, tetapi dapat melalui strategi lain seperti pembangunan fisik, pelayanan publik, atau program-program sosial.

Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kekayaan daerah dan IFR bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh orientasi kebijakan serta prioritas pengelolaan masing-masing pemerintah daerah.

4.8.3 Pengaruh Opini Audit terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*. Secara substantif, temuan ini

menunjukkan bahwa perolehan opini audit yang baik, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), belum tentu diikuti dengan peningkatan tingkat pengungkapan informasi keuangan melalui media internet. Opini audit pada dasarnya merepresentasikan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga fokus utamanya berada pada aspek kepatuhan dan kualitas penyusunan laporan, bukan pada strategi penyebarluasan informasi kepada publik.

Dalam konteks pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024, tidak signifikannya variabel opini audit dapat dimaknai bahwa kualitas opini yang diberikan auditor eksternal tidak secara langsung memengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan memperbarui informasi keuangan pada website resmi. Hal ini menunjukkan bahwa proses audit dan proses pengungkapan informasi berbasis internet merupakan dua mekanisme yang berbeda. Audit berorientasi pada evaluasi atas laporan keuangan yang telah disusun, sedangkan Internet Financial Reporting memerlukan inisiatif administratif dan kebijakan komunikasi publik yang aktif dari pemerintah daerah. Dengan demikian, pencapaian opini WTP tidak otomatis mencerminkan tingkat keterbukaan informasi digital yang lebih baik.

Dalam perspektif teori legitimasi, opini audit dapat dipandang sebagai bentuk legitimasi formal yang diperoleh melalui kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pemeriksaan eksternal, sementara Internet Financial Reporting merupakan bentuk legitimasi komunikatif yang ditujukan secara langsung kepada

masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua bentuk legitimasi tersebut tidak selalu berjalan secara paralel. Pemerintah daerah dapat memperoleh legitimasi formal melalui opini audit yang baik, namun belum tentu mengoptimalkan transparansi digital sebagai sarana membangun legitimasi sosial. Oleh karena itu, tidak signifikannya opini audit dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi legitimasi melalui audit dan strategi legitimasi melalui keterbukaan informasi berbasis internet merupakan dua dimensi yang relatif independen.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Roviko Erni Anisaputri (2022) serta Anastasia Yaniarwana Sarumaha dkk. (2024) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa opini audit lebih berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi, bukan dengan strategi pengungkapan informasi melalui internet. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Triana Saraswati dkk. (2023) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap IFR. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi opini audit yang lebih besar dalam penelitian tersebut, sementara dalam penelitian ini mayoritas pemerintah daerah memperoleh opini WTP sehingga variasinya relatif kecil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, dan Opini Audit terhadap Internet Financial Reporting (IFR) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2022–2024 dengan jumlah observasi sebanyak 105.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, semakin besar kecenderungan pemerintah daerah tersebut untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan melalui media internet.
2. Kekayaan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya total aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak secara langsung mendorong peningkatan transparansi berbasis internet.
3. Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting*. Hal ini mengindikasikan bahwa perolehan opini audit yang

baik belum tentu diikuti dengan peningkatan pengungkapan informasi keuangan secara digital.

Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*. Nilai koefisien determinasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa variasi IFR sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.



5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Nilai koefisien determinasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa model penelitian belum mampu menjelaskan variasi *Internet Financial Reporting* secara komprehensif. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang belum dimasukkan dalam model.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang bersifat keuangan, sehingga belum mempertimbangkan faktor non-keuangan yang mungkin berpengaruh terhadap penerapan IFR.
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan *pooled regression* tanpa mempertimbangkan efek tetap (*fixed effect*) antar daerah, sehingga kemungkinan adanya karakteristik khusus masing-masing daerah belum sepenuhnya terakomodasi dalam model.
4. Variasi opini audit dalam periode penelitian relatif kecil karena mayoritas pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga pengaruh variabel ini terhadap IFR menjadi terbatas.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar variabel keuangan untuk memperoleh model yang lebih komprehensif dalam menjelaskan variasi *Internet Financial Reporting*.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan analisis data panel yang mempertimbangkan efek tetap (*fixed effect*) atau efek acak (*random effect*). Pendekatan ini memungkinkan karakteristik khusus masing-masing daerah dapat terakomodasi dengan lebih baik sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan representatif.
3. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian. Dengan melibatkan lebih banyak provinsi atau seluruh pemerintah daerah di Indonesia, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.
4. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas transparansi informasi keuangan berbasis internet. Meskipun kapasitas fiskal terbukti berpengaruh, peningkatan IFR juga perlu didukung oleh komitmen tata kelola dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, Y., & Setiawan, D. (2025). INTERNET FINANCIAL REPORTING: REVEALING STRATEGIES AND PRACTICES IN REGIONAL GOVERNMENT. *Corporate And Business Strategy Review*.
- A Winangsih, A. W., & Rigel Nurul Fathah. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Daerah Di Indonesia.
- Erni Anisaputri, R. (2022). *PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, BELANJA DAERAH, JUMLAH PENDUDUK DAN OPINI AUDIT TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INTERNET (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*.
- Ferryansah, Evana, E., & Dharma, F. (2023). Analysis Of Regional Financial Report Disclosure Factors: A Literature Review. *International Journal Of Asian Business And Management*.
- Inten Meutia, Shelly F. Kartasari, & Zulnaldi Yaacob. (2022). Stakeholder Or Legitimacy Theory? The Rationale Behind A Company's Materiality Analysis: Evidence From Indonesia. *Sustainability*, 14(13), 7763.
- Kurniawati, & Sari. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap IFR*.
- Meini, Z., L. Tobing, K. S., Lantana, D. A., Digdowiseiso, K., & Muhmad, S. N. (2023). *THE IMPLEMENTATION OF INTERNET FINANCIAL*

*REPORTING (IFR) IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE
REVIEW.*

Meutia, I., Kartasari, S. F., & Yaacob, Z. (2022). Stakeholder Or Legitimacy Theory? The Rationale Behind A Company's Materiality Analysis: Evidence From Indonesia.

Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring Factors Influencing Digital Transparency In Local Governments: Practices In Indonesia.

Ogunode, O. A. (2022). Legitimacy Theory And Environmental Accounting Reporting And Practice: A Review. *South Asian Journal Of Social Studies And Economics.*

Open Data Provinsi Jawa Tengah. (2025). Website Data.Jatengprov.Go.Id

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (2016).

Puji Astuti, R., & Putri Pertiwi, I. F. (2022). The Influence Of Local Government Size, Leverage, And Audit Opinion On Transparency Of Regional Financial Reports With Internet Financial Reporting As An Intervening Variable. *Accounting And Finance Studies.*

- Rahayu, S., & Nur Khasanah, F. W. (2022). *Internet Financial Reporting: In The Case Of District And City Governments In Central Java Province, Indonesia.*
- Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudibyoy, Y. A. (2023). *Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet Dan Faktor Yang Memengaruhinya.*
- Sarumaha, A. Y., Andriani, W., Mustika, R., & Zahara, Z. (2024). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Belanja Daerah Dan Opini Audit Terhadap Aksesibilitas Internet Financial Reporting Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business.*
- Sri Wahyuni Wulandari, & Erna Sulistyowati. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah, Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Internet Financial Reporting Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak.*
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D.
- Suprianto, E., & Salim, A. (2024). The Effect Of Local Government Wealth On Internet Financial Reporting (IFR) Compliance With Local Geographic As A Moderation Variable: A New Institutional Theory Approach. *Cogent Business And Management.*
- Susanti, A. I., Kurnia, & Hakim. (2024). *The Effect Of Local Government Wealth On IFR Compliance.*

Triana, H., Sulistyarningsih, S., Jumpanata, J., & Yamani, Y. (2023). Standard Operating Procedures Of Antenatal Care And Its Relation With Pregnant Women's Satisfaction During Pregnancy Examination: Results Of A Survey At Gamping I Public Health Center, Yogyakarta, Indonesia.

Triana Saraswati, Laeli Budiarti, & Yudha Aryo Sudiby. (2023). *Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Internet Dan Faktor Yang Memengaruhinya.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (2004).

Wahyuni, F., & Arpris Pangestu, A. (2024). Factors Influencing Internet Financial Reporting Quality: Audit Opinion As A Moderator.

Winangsih, A., & Nurul Fathah, R. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8).

Wulandari, S. W., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh PAD, Ukuran Pemerintah, Dan Belanja Pemerintah Terhadap Pelaksanaan IFR Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Ejournal.Araei.Or.Id/Index.Php/JIEAP/Article/View/397*.

Zumratul Meini, Khairul Saleh L. Tobing, Dhieka Avrilia Lantana, Kumba

Digdowiseiso, & Siti Nurain Muhmad. (2023). THE IMPLEMENTATION OF INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Journal Of Accounting Research, Utility Finance And Digital Assets*.

